

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan Jawa Timur pada tanggal 24 - 29 Juni 2024 dapat disimpulkan bahwa:

- a. Tenaga Kesehatan memiliki peranan yang penting dalam mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat dalam hidup sehat serta meningkatkan pelayanan kesehatan secara merata pada masyarakat luas.
- b. Mahasiswa telah memperoleh wawasan, keterampilan, pengetahuan dan pengalaman praktis mengenai tujuan, fungsi, tugas pokok, kedudukan dan wewenang dari Bidang Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- c. Mahasiswa mengenal program-program Seksi Faralkes dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Dinas Kesehatan.
- d. Mahasiswa telah mempelajari serta mengetahui gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian dalam Dinas Kesehatan.

5.2 Saran

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan Jawa Timur pada tanggal 24 - 29 Juni 2024 dapat diberikan saran sebagai berikut:

- a. Mahasiswa calon Apoteker lebih mempersiapkan diri dengan meningkatkan pemahaman mengenai agar dapat melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dengan baik.
- b. Mahasiswa diharapkan lebih aktif dan tanggap selama menjalankan praktek kerja profesi agar para calon apoteker mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak sehingga mampu mencapai semua apa yang menjadi tujuan yang direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. 2019, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang sering disalahgunakan*, Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. 2004, Keputusan Kepala BPOM No HK.00.05.4.2411 tertanggal 17 Mei 2004 tentang Ketentuan pokok pengelompokan dan penandaan obat bahan alam Indonesia, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Departemen Kesehatan RI, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Gubernur Jawa Timur. 2021, *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*, Jawa Timur: Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur.
- Kemenkes RI, 2014, *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pemasukan Alat Kesehatan melalui Mekanisme Jalur Khusus (Special Access Scheme)*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI. 2018, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI, 2022, *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI, 2023, *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI, 2023, *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI. 2021, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI. 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI. 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI. 2012, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI. 2012, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.